

Presiden Republik Indonesia [analisis perbandingan] / Tadjuddien Noor Bolimakalu

Tadjuddien Noor Bolimakalu, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20267421&lokasi=lokal>

Abstrak

ABSTRAK

Penyelenggaraan negara di manapun sentralnya ada pada pundak kepala eksekutif dengan titel Presiden atau Perdana Menteri. Dalam kenyataannya pelaksanaan tugas dan wewenang Kepala eksekutif ini selalu mendapat sorotan dan menjadi tema studi yang tidak kunjung berakhir. Keadaan yang sama juga dialami oleh Presiden Indonesia. Pengamatan penulis menunjukkan bahwa ada kekurangan sarana studi dalam melihat Presiden menurut UUD 1945 dalam berbagai tulisan maupun komentar. Menurut hemat penulis untuk mengetahui bagaimana sesungguhnya Presiden menurut UUD 1945 perlu dilihat dengan kaca mata budaya penyelenggaraan negara yang dipengaruhi oleh budaya bernegara tempo dulu baik zaman kerajaan maupun zaman penjajahan serta membandingkan dengan Presiden negara lain baik di wilayah Eropah Kontinental maupun Anglosaxon. Budaya hidup bernegara tempo dulu baik yang dimiliki dan dialami oleh bangsa Amerika (Amerika Serikat), bangsa Perancis maupun bangsa Indonesia ternyata dengan penelitian sederhana ini membuktikan adanya pengaruh. Bangsa Amerika sejak tempo dulu sebelum mendirikan negara Amerika Serikat telah hidup berdasarkan prinsip kebebasan dan persamaan yang berakar dari hasrat mereka bermigrasi dari Eropah ke Amerika. Prinsip tersebut mewarnai hampir segala segi kehidupan bernegara termasuk bagaimana mereka menempatkan Presiden dalam negara mereka. Bangsa Perancis berabad-abad hidup dalam rezim monarki termasuk pula monarki absolut. Revolusi Perancis merupakan buah karya bangsa Perancis untuk membetulkan penyelenggaraan negara Setelah revolusi itu bangsa Perancis hidup dalam negara Republik. Akan tetapi Republik pun tidak mulus. Akhirnya sampai Republik tahun 1958 dan amendmen 1962 dan 1964. Pasang surut berneacara banasa Perancis tersebut kemudian menghasilkan posisi Presiden Perancis seperti sekarang, yaitu memiliki kekua-

« ^ vfrr T mt besar Pengalaman bangsa Indonesia mirip
saan yang amat besar- ^ bahkan ada kemiripan antara
gagasan Demokrasi Terpimpin dengan gagasan penafsiran UUD
gagasan uemoKic Gaulle. Persamaan itu terletak pada
nn^isi"presiden dengan kekuasaan yang besar dalam penye-
1 enaaaraan negara guna menanggulangi labilitas negara yang
lenggaraan ncyai» 3 nenelitian m i adalah
tidak men^ n^u^ o n e s i a tidak melebihi kedudukan Presiden
bahwa presl?@n . presiden Perancis bahkan secara yuri-
Amerika Serikat • ibannya jauh lebih besar sementara
wewenangnya3 y a n g besar memang dibutuhkan dalam penyelenggaraan
negara Indonesia. Kalau ada nada bariton terhadap kedudukan Presiden Indonesia
sebenarnya karena telah keliru pemahamannya. Hal ini
terjadi karena studi yang dilakukan terlalu banyak menggunakan
kaca mata orang lain. Kalau perlu memperbaiki citra
kekuasaan lembaga Kepresidenan maka menurut hemat penulis
perbaikan yang terpenting terletak pada perbaikan dinamika
lembaga tertinggi dan tinggi negara lainnya.